

LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

1. Secara historis apa arti keistimewaan bagi DIY?
2. Apa latar belakang yang mendasari dibuatnya Undang-Undang Keistimewaan DIY?
3. Sejak kapan Implementasi Undang-Undang Keistimewaan ini dilaksanakan?
4. Apa manfaat secara umum yang bisa diperoleh bagi Pemerintah DIY maupun masyarakat dengan Implementasi Undang-Undang Keistimewaan tersebut?
5. Setelah adanya Undang-Undang keistimewaan DIY adakah perubahan-perubahan yang Nampak dari Keistimewaan DIY itu sendiri?
6. Terkait dengan lima pokok Undang-Undang Keistimewaan DIY apa saja program yang yang dilaksanakan?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY agar program-program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan?
8. Apa sasaran yang ingin dituju dari Implementasi Undang-Undang Keistimewaan ini?
9. Darimana sumberdaya pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Keistimewaan didapat?
10. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan sumberdaya tersebut?
11. Seperti apa pengalokasian sumberdaya tersebut?
12. Bagaimana cara pemda DIY untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut secara maksimal?
13. Adakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan sumberdaya tersebut?
14. Bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pelaksana Implementasi agar nantinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?
15. Bagaimana tanggapan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan UUK ini?

16. Apakah dalam Implementasi Undang-Undang Keistimewaan tersebut pemerintah pusat juga turut mengambil bagian?
17. Terkait dengan pelaksanaan implementasi tersebut bagaimana tingkat kepatuhan pelaksana dalam menjalankan setiap program?
18. Ketika pemda DIY memberikan arahan maupun perintah apakah respon dari pelaksana kebijakan cepat?
19. Apakah kejelasan petunjuk-petunjuk pelaksanaan program mudah dipahami oleh pelaksana?
20. Apakah pelaksana dalam kebijakan tersebut sudah konsisten dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai?
21. Dari pemda DIY sendiri apakah staff pelaksana Implementasi Undang-Undang Keistimewaan ini sudah mencukupi?
22. Bagaimana alur informasi yang diberikan dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Keistimewaan ini?
23. Apakah fasilitas dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Keistimewaan ini sudah memenuhi?
24. Bagaimana karakteristik pelaksana terkait dengan arahan ataupun perintah yang diberikan oleh atasan dalam pelaksanaan Implementasi tersebut?
25. Bagaimana SOP yang diterapkan dalam pelaksanaan Implementasi tersebut?
26. Bagaimana langkah yang diambil oleh pemda DIY untuk menjalankan SOP secara maksimal?
27. Adakah sanksi yang diberikan oleh pemda DIY terhadap pelaksana yang tidak mematuhi SOP tersebut?
28. Bagaimana penyebaran tanggung jawab pelaksana kebijakan tersebut di pemda DIY ini?